

# *Jurnal* Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 7, NO. 1, JUNI 2016

ISSN: 2086-6313

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH BERKELANJUTAN  
DI PROVINSI JAMBI MELALUI PENDEKATAN MODEL FLAG**

*Novita Erlinda*

**KONSOLIDASI DESENTRALISASI FISKAL  
MELALUI REFORMASI KEBIJAKAN BELANJA DAERAH BERKUALITAS**

*Bambang Juanda dan Dedy Heriwibowo*

**TATA KELOLA KELEMBAGAAN MINERAL FUND  
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN:  
STUDI KASUS KABUPATEN BOMBANA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

*La Ode Alwi, Arya Hadi Dharmawan, Akhmad Fauzi, dan M. Parulian Hutagaol*

**BIAYA INTERMEDIASI KEUANGAN PERBANKAN INDONESIA:  
PERANAN REGULASI DAN INSTITUSI**

*Davy Hendri*

**KENDALA IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PBB-P2  
OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

*Mandala Harefa*

**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN  
MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP)**

*Dewi Restu Mangeswuri*

**DAMPAK KETERKAITAN EKONOMI PULAU SULAWESI, JAWA TIMUR,  
DAN KALIMANTAN TIMUR TERHADAP EKONOMI WILAYAH**

*Arman, Setia Hadi, Noer Azam Achsani, dan Akhmad Fauzi*

**KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA TASIKMALAYA**

*Ebed Hamri, Eka Intan Kumala Putri, Hermanto J. Siregar, dan Deddy S. Bratakusumah*

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**

# *Jurnal* Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 7, NO. 1, JUNI 2016

ISSN: 2086-6313

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v-vii
Abstrak .....	ix-xix
<b>KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH BERKELANJUTAN DI PROVINSI JAMBI MELALUI PENDEKATAN MODEL <i>FLAG</i></b>	
<i>Novita Erlinda</i> .....	1-14
<b>KONSOLIDASI DESENTRALISASI FISKAL MELALUI REFORMASI KEBIJAKAN BELANJA DAERAH BERKUALITAS</b>	
<i>Bambang Juanda dan Dedy Heriwibowo</i> .....	15-28
<b>TATA KELOLA KELEMBAGAAN <i>MINERAL FUND</i> DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: STUDI KASUS KABUPATEN BOMBANA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>	
<i>La Ode Alwi, Arya Hadi Dharmawan, Akhmad Fauzi, dan M. Parulian Hutagaol</i> .....	29-42
<b>BIAYA INTERMEDIASI KEUANGAN PERBANKAN INDONESIA: PERANAN REGULASI DAN INSTITUSI</b>	
<i>Davy Hendri</i> .....	43-65
<b>KENDALA IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PBB-P2 OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR</b>	
<i>Mandala Harefa</i> .....	67-82
<b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP)</b>	
<i>Dewi Restu Mangeswuri</i> .....	83-95
<b>DAMPAK KETERKAITAN EKONOMI PULAU SULAWESI, JAWA TIMUR, DAN KALIMANTAN TIMUR TERHADAP EKONOMI WILAYAH</b>	
<i>Arman, Setia Hadi, Noer Azam Achsani, dan Akhmad Fauzi</i> .....	97-109
<b>KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA TASIKMALAYA</b>	
<i>Ebed Hamri, Eka Intan Kumala Putri, Hermanto J. Siregar, dan Deddy S. Bratakusumah</i> .....	111-125

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**

## KATA PENGANTAR

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik kembali hadir di hadapan pembaca budiman dengan delapan tulisan yang membahas hasil penelitian dan kajian terhadap sejumlah isu ekonomi dan kebijakan publik. Pada edisi kali ini, JEKP menerima tulisan dari berbagai sumber, baik secara internal di lingkungan Pusat Penelitian BKD maupun sejumlah universitas dan kementerian/lembaga. Kedelapan tulisan tersebut membahas persoalan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembangunan perkotaan dan daerah, isu kemiskinan, perkembangan sektor industri, serta kinerja BUMN. Beragamnya lembaga asal penulis dan isu-isu yang diangkat tentunya diharapkan semakin memperkokoh fondasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ekonomi dan kebijakan publik.

Tulisan yang berjudul **“Kebijakan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Provinsi Jambi melalui Pendekatan Model FLAG”** ditulis oleh Novita Erlinda, mengawali edisi jurnal kali ini. Tulisan ini memusatkan analisisnya pada isu arti pentingnya agenda pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan pada tatanan nasional maupun regional sebagai dasar untuk mengurangi besarnya potensi biaya sosial dan lingkungan ke depan. Namun demikian, pengukuran keberlanjutan sering terkendala dengan kompleksitas indikator keberlanjutan itu sendiri. Tulisan dengan studi kasus di Provinsi Jambi dan menggunakan metode *multi-criteria analysis* melalui pendekatan model FLAG menunjukkan hasil bahwa skenario pembangunan eksisting cenderung kurang memberikan keberpihakan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi pembangunan baru berbasis sumber daya lokal dan ekonomi nonekstraktif diperlukan untuk menghasilkan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Tulisan kedua ditulis oleh Bambang Juanda and Dedy Heriwibowo yang berjudul **“Konsolidasi Desentralisasi Fiskal melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas”**. Analisis kajiannya dipusatkan pada isu belum kuatnya implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Masih dominannya permasalahan kemiskinan, kesenjangan antardaerah, dan rendahnya kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur masih mendominasi masalah daerah mensyaratkan dilansirnya kebijakan belanja daerah yang berkualitas sehingga desentralisasi fiskal akan semakin dapat terkonsolidasikan. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan belanja daerah yang berkualitas, tulisan yang merupakan hasil kajian ini mendorong perlunya penguatan daerah antara lain dalam penyusunan prioritas dan penyederhanaan mekanisme pembahasan anggaran, alokasi DAK berdasarkan proposal kegiatan untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal dan prioritas nasional, penganggaran hibah dan bansos yang lebih transparan dan akuntabel, serta penyederhanaan dan pengintegrasian sistem pelaporan pemerintah daerah secara komprehensif.

Tulisan ketiga berjudul **“Tata Kelola Kelembagaan Mineral Fund dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara”** ditulis oleh La Ode Alwi, Arya Hadi Dharmawan, Akhmad Fauzi, dan M. Parulian Hutagaol. Para penulis menganalisis tentang kecenderungan terjebaknya daerah penghasil tambang ke dalam apa yang disebut sebagai *natural resource curse* dan *dutch disease*, yakni kondisi gagalannya sektor ini dalam menyejahterakan masyarakat yang disebabkan adanya bias sasaran, bias program, dan bias koordinasi. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa regulasi, program yang tepat sasaran, pengawasan terhadap biaya produksi dan hasil produksi tambang, dan kelembagaan pengelola *mineral fund* menjadi hal penting yang harus disediakan dan dilakukan pemerintah. Dengan pengelolaan *mineral fund* dapat menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologis/lingkungan.

Tulisan keempat ditulis oleh Davy Hendri dengan judul **“Biaya Intermediasi Keuangan Perbankan Indonesia: Peranan Regulasi dan Institusi”**. Penulis membahas faktor-faktor penentu margin suku bunga (NIM) di Indonesia dengan menggunakan *dataset* panel bank yang periode tahun 2004-2012 yang mencakup sampel 42 bank umum komersial dari keseluruhan bank yang beroperasi. Kajian yang menggunakan pengembangan teori *dealership model* menemukan fakta yang berbeda dengan kasus di negara maju bahwa karakteristik spesifik perbankan, seperti ukuran, likuiditas, dan kekuatan pasar, serta struktur pasar di mana bank beroperasi, menjelaskan sebagian besar variasi NIM. Kendati demikian, regulasi dan kualitas institusi ternyata tidak cukup membantu menjelaskan variasi biaya intermediasi keuangan ini. Terlepas dari itu semua,

secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat potensi besar suatu kebijakan untuk mendorong persaingan perbankan dan memperkuat kerangka kerja institusional dalam mengurangi biaya intermediasi sistem perbankan.

Tulisan kelima berjudul **“Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar”** ditulis oleh Mandala Harefa. Penulis memusatkan analisisnya pada implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, kewenangan pemungutan pajak dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dialihkan kepada pemerintah kota/kabupaten. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Dispenda Pemerintah Kota Makassar melalui sebuah lembaga khusus berbentuk unit pelaksana tugas (UPT) telah menunjukkan kriteria *“sangat efektif”*. Namun demikian, proporsinya dari sisi penerimaan masih rendah. Kenaikan penerimaan tersebut semata-mata terjadi karena adanya kebijakan menaikkan tarif PBB yang diberlakukan oleh Pemkot. Sedangkan sumbangan PBB tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa peran penerimaan PBB terhadap realisasi PAD Kota Makassar termasuk dalam kriteria masih rendah.

Tulisan keenam ditulis oleh Dewi Restu Mangeswuri berjudul **“Kebijakan Pembiayaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan”**. Penulis mengangkat isu implementasi kebijakan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tengah-tengah terbatasnya daya beli masyarakat membeli rumah secara tunai dalam rangka mengurangi tingginya angka *backlog*. Tulisan yang merupakan hasil kajian dengan basis data sekunder menunjukkan bahwa program FLPP yang menyandarkan pada pembiayaan APBN ini telah terealisasi sesuai dengan perencanaannya. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas program ini, alternatif kebijakan pembiayaan perumahan lainnya seperti kebijakan Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Uang Muka (BUM) perlu terus didorong implementasinya sehingga akses kredit pemilikan rumah golongan masyarakat berpenghasilan rendah akan terus terjaga.

Tulisan ketujuh berjudul **“Dampak Keterkaitan Ekonomi Pulau Sulawesi, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur terhadap Ekonomi Wilayah”**, ditulis secara bersama-sama oleh Arman, Setia Hadi, Noer Azam Achsani, dan Akhmad Fauzi. Tulisan hasil penelitian ini menganalisis dampak keterkaitan ekonomi antarwilayah Sulawesi Lain, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Tulisan dengan teknik RAS ini hasil analisisnya menunjukkan bahwa transaksi aliran barang antara wilayah Sulawesi Lain dengan Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Kebutuhan *input* antara Sulawesi Lain dan Sulawesi Selatan lebih banyak dipasok dari wilayah Jawa Timur. Kedua wilayah tersebut lebih banyak bergantung pasokan aliran barang dari wilayah Jawa Timur. Keterkaitan ekonomi antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Lain terhadap Kalimantan Timur dipengaruhi aliran komoditas pertanian dan energi. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Lain banyak memasok kebutuhan pangan sedangkan wilayah Kalimantan memasok kebutuhan energi ke Sulawesi. Wilayah Jawa Timur memperoleh manfaat ekonomi yang paling besar akibat interaksi ekonomi dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Lain, dan Kalimantan Timur. Dampak keterkaitan ekonomi pada keempat wilayah menunjukkan Jawa Timur memperoleh manfaat yang lebih besar. Namun demikian, kinerja dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur memberikan pengaruh *spillover* yang masih sangat kecil terhadap wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Lain, dan Kalimantan Timur.

*Last but not least*, tulisan kedelapan dan sekaligus menjadi tulisan penutup jurnal edisi ini berjudul **“Kebijakan Pemekaran Wilayah dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya”**. Tulisan yang disajikan oleh Ebed Hamri, Eka Intan Kumala Putri, Hermanto J. Siregar, dan Deddy S. Bratakusumah ini menganalisis perkembangan struktur perekonomian wilayah dan sektor unggulan yang menjadi daya saing perekonomian wilayah Kota Tasikmalaya dibandingkan daerah sekitarnya (*hinterland*). Tulisan yang merupakan hasil penelitian dan menggunakan analisis tipologi Klassen, Indeks Diversitas Entropi (IDE), dan *Location Quotient* (LQ) ini menunjukkan bahwa hasil Analisis Tipologi Klassen, Kota Tasikmalaya termasuk klasifikasi daerah berkembang cepat, dibandingkan wilayah *hinterland*-nya Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran, masuk dalam klasifikasi *daerah relatif tertinggal*. Analisis IDE menunjukkan sektor-sektor perekonomian Kota Tasikmalaya lebih berkembang dibandingkan daerah *hinterland*-nya seperti terlihat dari rata-rata indeks diversitas entropi Kota Tasikmalaya yang lebih besar dibandingkan rata-rata nilai entropi wilayah sekitarnya. Hasil analisis LQ pun menunjukkan hasil yang kurang lebih sama.

Besar harapan kami semoga tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Ucapan terima kasih dan penghargaan

yang agung kita sampaikan kepada seluruh mitra bestari dan redaktur pelaksana yang telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan perbaikan, baik secara substansial maupun redaksional. Ucapan terima kasih tak lupa disampaikan kepada seluruh jajaran sekretariat dan tata usaha yang telah mendukung suksesnya penerbitan jurnal edisi ini. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, terima kasih dan penghargaan juga sepatutnya kita sampaikan kepada Kapuslit BKD tanpa mana dukungan kedinasan dan program penerbitan mustahil akan dapat diraih.

Jakarta, 30 Juni 2016

Hormat kami,  
Dewan Redaksi

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**



# Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 7, NO. 1, JUNI 2016

ISSN: 2086-6313

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

**Novita Erlinda** (Institut Pertanian Bogor)

## **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH BERKELANJUTAN DI PROVINSI JAMBI MELALUI PENDEKATAN MODEL FLAG**

*JEKP*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 1-14

### **Abstrak**

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi suatu keniscayaan agenda pembangunan, baik pada tatanan nasional maupun regional. Capaian indikator pembangunan berkelanjutan yang meliputi tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan sangat penting untuk dilakukan, karena pembangunan dengan pola *business as usual* akan menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang cukup mahal. Namun demikian, pengukuran keberlanjutan sering terkendala dengan kompleksitas indikator keberlanjutan itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan berkelanjutan pada tingkat regional di Provinsi Jambi dengan menggunakan metode *multi-criteria analysis* melalui pendekatan model FLAG. Tingkat keberlanjutan pembangunan daerah akan dianalisis dengan menentukan *Critical Threshold Value* (CTV) dari pembangunan, yang ditetapkan oleh tujuan kebijakan atau kendala eksogen. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menyangkut nilai CTV diperoleh melalui *Focus Group Discussion*, sementara data sekunder terkait dengan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan diperoleh dari berbagai sumber. Data aktual capaian pembangunan di Provinsi Jambi digunakan sebagai informasi untuk mengetahui bagaimana pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi saat ini. Tingkat keberlanjutan pembangunan akan ditunjukkan oleh warna bendera, di mana bendera hijau menunjukkan pembangunan yang berkelanjutan, sedangkan bendera kuning, merah, dan hitam menunjukkan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Hasil analisis dengan FLAG menunjukkan bahwa skenario pembangunan eksisting cenderung menghasilkan bendera merah dan kuning dengan melewati batas ambang kritis. Strategi pembangunan baru berbasis sumber daya lokal dan ekonomi nonekstraktif diperlukan untuk menghasilkan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Kata kunci: pembangunan wilayah berkelanjutan, *FLAG*, *critical threshold value*

**Bambang Juanda** (Institut Pertanian Bogor) dan **Dedy Heriwibowo** (Bappeda Kabupaten Sumbawa)

### **KONSOLIDASI DESENTRALISASI FISKAL MELALUI REFORMASI KEBIJAKAN BELANJA DAERAH BERKUALITAS**

*JEKP*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 15-28

#### **Abstrak**

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif. Permasalahan kemiskinan, kesenjangan antardaerah dan individu yang memburuk, rendahnya kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur masih mendominasi masalah daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong terwujudnya belanja daerah yang berkualitas dalam rangka konsolidasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mendefinisikan belanja pemerintah daerah yang berkualitas, mengidentifikasi regulasi yang bermasalah, dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan yang mendorong terwujudnya belanja berkualitas. Kebijakan belanja daerah yang berkualitas merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar belanja daerah dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, yang digunakan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Namun masih terdapat berbagai regulasi saat ini yang cenderung belum sinkron dan menghambat terwujudnya belanja daerah yang berkualitas. Agenda reformasi kebijakan yang mendukung terwujudnya belanja daerah yang berkualitas perlu ditekankan pada aspek penguatan daerah dalam menyusun dan melaksanakan prioritas anggaran, penyederhanaan mekanisme pembahasan anggaran, penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah, alokasi DAK berdasarkan proposal kegiatan untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal dan prioritas nasional, penganggaran hibah dan bansos yang lebih transparan dan akuntabel, serta penyederhanaan dan pengintegrasian sistem pelaporan pemerintah daerah.

Kata kunci: belanja berkualitas, perencanaan, penganggaran

**La Ode Alwi** (Universitas Haluoleo), **Arya Hadi Dharmawan** (Institut Pertanian Bogor),  
**Akhmad Fauzi** (Institut Pertanian Bogor), dan **M. Parulin Hutagaol** (Institut Pertanian Bogor)

### **TATA KELOLA KELEMBAGAAN MINERAL FUND DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: STUDI KASUS KABUPATEN BOMBANA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

*JEKP*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 29-42

#### **Abstrak**

Pengelolaan pertambangan pada suatu daerah sejatinya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya pada daerah penghasil tambang itu sendiri. Namun yang terjadi justru daerah penghasil tambang terjebak dalam *natural resource curse* dan *dutch disease*. Pendapatan daerah dari *mineral fund* merupakan instrumen *cash transfer* yang cenderung gagal menyejahterakan masyarakat yang disebabkan adanya bias sasaran, bias program, dan bias koordinasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah (1) menentukan indikator kunci tata kelola kelembagaan *mineral fund* dan (2) menentukan alternatif terbaik dalam pemanfaatan *mineral fund*. Hasil penelitian menunjukkan (i) indikator kunci yang mempunyai tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam tata kelola kelembagaan *mineral fund* adalah adanya ketersediaan regulasi, program yang tepat sasaran, adanya pengawasan terhadap biaya produksi tambang yang digunakan perusahaan, pengawasan hasil produksi tambang yang dihasilkan perusahaan, dan adanya badan pengelola *mineral fund* yaitu institusi multi pihak (ii) alternatif terbaik pemanfaatan *mineral fund* yang menunjang pembangunan daerah berkelanjutan, yakni (a) aspek sosial, meliputi peningkatan sarana kesehatan, pendidikan dan ibadah, peningkatan peran masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, kualitas SDM yang tinggi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, (b) aspek ekonomi, meliputi pengembangan lembaga ekonomi dan keuangan, diversifikasi ekonomi perdesaan, pembangunan investasi primer, peningkatan iklim investasi dan pengembangan produk lokal, dan (c) aspek ekologi/lingkungan, meliputi: penanganan pencemaran, proteksi dan keselamatan ekologi dan manusia, penanganan munculnya bencana alam dan penanganan lahan akhir sebagai sektor primer.

Kata kunci: tata kelola, kelembagaan, *mineral fund*, pembangunan berkelanjutan

Davy Hendri (IAIN Imam Bonjol)

## BIAYA INTERMEDIASI KEUANGAN PERBANKAN INDONESIA: PERANAN REGULASI DAN INSTITUSI

JEKP, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 43-65

### Abstrak

Studi ini membahas faktor-faktor penentu margin suku bunga (NIM) di Indonesia dengan menggunakan dataset panel bank periode tahun 2004-2012 yang mencakup sampel 42 bank umum komersial dari keseluruhan bank yang beroperasi. Studi ini menggunakan pengembangan teori *dealership model* dalam analisis guna menentukan variabel dominan penentu NIM. Hal ini dilakukan dengan memasukkan variabel kondisi makroekonomi, kelembagaan, dan regulasi dalam dunia perbankan. Dengan data perbankan yang mencakup kategori perbankan menurut kepemilikan saham terbesar (BUMN, asing, dan campuran) dan lingkup pelayanan (devisa), analisis regresi panel *fixed effect* dilakukan dengan mengkomparasikan determinan karakteristik khusus (*time-variant*) masing-masing bank tersebut. Hasil analisis studi ini menemukan fakta bahwa memang karakteristik spesifik perbankan, seperti ukuran, likuiditas, dan kekuatan pasar, serta struktur pasar di mana bank beroperasi, menjelaskan sebagian besar variasi NIM. Namun regulasi dan kualitas institusi ternyata tidak cukup membantu menjelaskan variasi biaya intermediasi keuangan ini. Temuan ini memang berbeda jauh dengan temuan pada studi perbankan pada negara maju. Hal ini setidaknya bisa dijelaskan oleh kemungkinan *level* regulasi perbankan Indonesia yang justru sudah pada standar maksimum dan kemungkinan indikator regulasi tidak bisa dipandang terisolasi dari struktur hak kepemilikan dan kompetisi yang sudah terbangun dalam dunia perbankan sebelumnya. Namun secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa ada potensi besar kebijakan untuk mendorong persaingan perbankan dan memperkuat kerangka kerja institusional guna lebih mengurangi biaya intermediasi sistem perbankan.

Kata kunci: *net interest margin*, struktur pasar, makroekonomi, tata kelola yang baik

Mandala Harefa (Puslit Badan Keahlian DPR RI)

## KENDALA IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PBB-P2 OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

JEKP, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 67-82

### Abstrak

Melalui implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, kewenangan pemungutan pajak dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Kondisi tersebut akan menstimulasi pemerintah daerah untuk berupaya lebih keras mencari potensi pendapatan PAD dari sektor PBB-P2 pada wilayah kewenangannya, termasuk di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah di Kota Makassar dan (2) mengetahui faktor penghambat efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pemungutan PBB-P2 oleh Dispenda Makassar meliputi wilayah perkotaan. Data mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lembaga terkait dan data sekunder dari berbagai terbitan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan pemungutan Pajak Bumi Bangunan P2 dilaksanakan oleh Dispenda Pemerintah Kota Makassar dengan membentuk lembaga khusus yang berbentuk unit pelaksana tugas (UPT), yang kewenangan pemungutan mencakup daerah perkotaan. Beberapa upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB-P2, antara lain dengan merevisi basis data yang diperoleh dari KPP, merevitalisasi pemungutan, meningkatkan pengawasan hasil pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan lembaga yang terkait, untuk pembayaran PBB. Efektivitas pemungutan PBB-P2 yang telah dilaksanakan oleh Dispenda melalui UPT khusus PBB Kota Makassar menunjukkan kriteria "*sangat efektif*", namun demikian proporsi dari sisi penerimaan masih rendah. Kenaikan penerimaan tersebut semata-mata adanya kebijakan menaikkan tarif PBB yang diberlakukan oleh Pemkot. Sedangkan sumbangan PBB tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa peran penerimaan PBB terhadap realisasi PAD Kota Makassar termasuk dalam kriteria masih rendah.

Kata kunci: PBB-P2, desentralisasi, pajak, penerimaan daerah, pemerintah kota

Dewi Restu Mangeswuri (Puslit Badan Keahlian DPR RI)

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP)**

*JEKP*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 83-95

#### **Abstrak**

Penyelenggaraan rumah dan perumahan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah karena setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, serasi, dan teratur sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain pengadaan perumahan secara fisik, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap masalah fasilitas pembiayaan perumahan tersebut karena tidak semua anggota masyarakat mampu memenuhi kebutuhan rumah secara tunai. Data sensus penduduk BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa angka *backlog* mencapai 13,5 juta unit. Oleh karena itu, melalui program FLPP pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang terjangkau. Sementara itu, tujuan penulisan kajian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana program FLPP telah berjalan selama ini dan mencoba menyajikan alternatif kebijakan lain untuk memperbaiki kualitas FLPP khususnya terkait dengan permasalahan pembiayaan perumahan. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mendasarkan pada sumber data sekunder dari jurnal, literatur, dan media daring serta sumber resmi lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa FLPP yang bersumber APBN sejauh ini telah sesuai dengan yang direncanakan. Sementara itu, dua alternatif kebijakan dinilai akan dapat melengkapi program FLPP, yaitu Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Uang Muka (BUM). Alternatif pilihan ini khususnya diharapkan mampu mengatasi kendala masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses kredit pemilikan rumah.

Kata kunci: pembiayaan, perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Arman (Universitas Trilogi), Setia Hadi (Institut Pertanian Bogor),  
Noer Azam Achsani (Institut Pertanian Bogor), dan Akhmad Fauzi (Institut Pertanian Bogor)

### **DAMPAK KETERKAITAN EKONOMI PULAU SULAWESI, JAWA TIMUR, DAN KALIMANTAN TIMUR TERHADAP EKONOMI WILAYAH**

*JEKP*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 97-109

#### **Abstrak**

Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia masih terus berlangsung, di mana Pulau Jawa menguasai  $\pm 60$  persen aktivitas ekonomi. Penelitian ini menganalisis dampak keterkaitan ekonomi antarwilayah Pulau Sulawesi, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo diintegrasikan menjadi satu unit wilayah menjadi Sulawesi Lain. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat diintegrasikan menjadi satu unit wilayah menjadi Sulawesi Selatan. Data dasar tahun 2005 di-*upgrade* ke tahun 2011 dengan menggunakan teknik RAS. Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi aliran barang antara wilayah Sulawesi Lain dengan Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Kebutuhan *input* antara Sulawesi Lain dan Sulawesi Selatan lebih banyak dipasok dari wilayah Jawa Timur. Kedua wilayah tersebut lebih banyak bergantung pasokan aliran barang dari wilayah Jawa Timur. Keterkaitan ekonomi antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Lain terhadap Kalimantan Timur dipengaruhi aliran komoditas pertanian dan energi. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Lain banyak memasok kebutuhan pangan, sedangkan wilayah Kalimantan memasok kebutuhan energi ke Sulawesi. Wilayah Jawa Timur memperoleh manfaat ekonomi yang paling besar akibat interaksi ekonomi dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Lain, dan Kalimantan Timur. Hasil interaksi memberikan pengaruh *spillover* yang sangat besar terhadap wilayah Jawa Timur. Pengaruh *spillover* mengindikasikan kinerja ekonomi wilayah Jawa Timur meningkat bila keterkaitan ekonomi (aliran barang) dengan Pulau Sulawesi dan Kalimantan Timur semakin kuat. Dampak keterkaitan ekonomi pada keempat wilayah menunjukkan Jawa Timur memperoleh manfaat yang lebih besar. Namun kinerja dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur memberikan pengaruh *spillover* yang masih sangat kecil terhadap wilayah Sulawesi dan Kalimantan.

Kata kunci: ekonomi wilayah, keterkaitan ekonomi, model IRIO

**Ebed Hamri** (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara),  
**Eka Intan Kumala Putri** (Institut Pertanian Bogor), **Hermanto J. Siregar** (Institut Pertanian Bogor), dan  
**Deddy S. Bratakusumah** (Pusbindiklatren, Jakarta)

## **KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA TASIKMALAYA**

*JEKP*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 111-125

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya sebagai kota hasil pemekaran tahun 2001 dan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat. Penelitian bertujuan menganalisis perkembangan struktur perekonomian wilayah dan sektor unggulan yang menjadi daya saing perekonomian wilayah Kota Tasikmalaya dibandingkan daerah sekitarnya (*hinterland*). Penelitian menggunakan analisis tipologi Klassen, Indeks Diversitas Entropi (IDE), dan *Location Quotient* (LQ). Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis tipologi Klassen, Kota Tasikmalaya termasuk klasifikasi daerah berkembang cepat, dibandingkan wilayah *hinterland*-nya Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran, masuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal. Analisis IDE menunjukkan sektor-sektor perekonomian Kota Tasikmalaya lebih berkembang dibandingkan daerah *hinterland*-nya. Terlihat rata-rata indeks diversitas entropi Kota Tasikmalaya (0,85) lebih besar dibandingkan rata-rata nilai entropi wilayah sekitarnya (*hinterland*), yaitu Kabupaten Tasikmalaya (0,71), Kabupaten Garut (0,67), Kabupaten Ciamis (0,81), Kota Banjar (0,83), dan Kabupaten Pangandaran (0,74). Besarnya nilai entropi menunjukkan perekonomian wilayah Kota Tasikmalaya lebih maju dan berkembang. Sedangkan dari hasil analisis LQ menunjukkan rata-rata LQ Kota Tasikmalaya (12,80) lebih besar dibandingkan rata-rata LQ wilayah *hinterland*-nya, yaitu Kabupaten Tasikmalaya (9,73), Kabupaten Garut (9,25), Kabupaten Ciamis (11,23), Kota Banjar (10,91), dan Kabupaten Pangandaran (10,20). Sektor-sektor unggulan yang menjadi sektor basis ekonomi Kota Tasikmalaya adalah bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa keuangan, serta jasa-jasa.

Kata kunci: pemekaran wilayah, tipologi Klassen, indeks diversitas entropi, kuosien lokasi, pusat pertumbuhan

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**

# Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 7, NO. 1, JUNE 2016

ISSN: 2086-6313

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

**Novita Erlinda** (Bogor Agricultural University)

## **SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT POLICY IN JAMBI PROVINCE USING FLAG APPROACH**

*JEKP*, Vol. 7, No. 1, June 2016, pp. 1-14

### **Abstract**

*Sustainable development has become a necessity for development agenda both at national and regional levels. Achieving sustainable development indicators which include three pillars, namely economic, social, and environment is very important since development model using business as usual will lead to social and environmental costs that are quite expensive. Nevertheless achieving development is often constrained by the complexity of sustainability indicators. This paper aims to evaluate sustainable development at the regional level in Jambi Province using multi-criteria analysis by means of FLAG model. Analysis of sustainability in the region was carried out by determining the Critical Threshold Value (CTV) of indicators set by the policy objectives. Primary data regarding the CTV values were obtained from Focus Group Discussion, while secondary data regarding economic, social, and environmental indicators were gathered from various sources. Actual data on development achievements in Jambi Province were used as information to assess on how sustainable development in Jambi Province. The level of sustainability will be shown by colored coded of green, yellow, red, and black. The green FLAG indicates sustainable development, while the yellow FLAGs, red, and black indicate unsustainable development. The analysis showed that the existing development policy tend to raise more yellow and red FLAGs, indicating unsustainability, while policy development scenarios with better utilization of local resources and non-extractive economic activities will result in better the achievement of sustainable development.*

*Keywords: sustainable regional development, FLAG, critical threshold value*



**Bambang Juanda** (Bogor Agricultural University) and **Deddy Heriwibowo** (Bappeda Kabupaten Sumbawa)

### **DECENTRALIZATION FISCAL CONSOLIDATION THROUGH POLICY REFORM OF LOCAL QUALITY SPENDING**

*JEKP*, Vol. 7, No. 1, June 2016, pp. 15-28

#### **Abstract**

*The implementation of fiscal decentralization in Indonesia did not entirely achieve a positive impact. The poverty problems, widening regional and individual disparities, low service quality of education, health, and infrastructure still dominates local problems. A policy to boost a qualified local spending for consolidation of fiscal decentralization in Indonesia is needed. This paper aims to define the qualified spending, identify regulatory problems, and provide recommendations to improve policies supporting the realization of qualified spending. A qualified spending policy is a government's efforts to allocate local spending based on priorities of regional development, so that it is used efficiently and effectively, timely, transparently, and accountably. However, there are still many current regulations which are not in line and impede the realization of qualified spending. Policy reform agenda supporting the realization of qualified spending should focus on aspects on strengthening the region in developing and implementing the budget priority, the simplification mechanism of budget discussions, implementation of medium term expenditure framework, development of list of Special Allocation Fund (DAK) to support the achievement of minimum service standard and national priority, more transparent and accountable budgeting of grants and social aid, as well as simplification and integration of the reporting system of local government.*

*Keywords: spending quality, planning, budgeting*

**La Ode Alwi** (Haluoleo University), **Arya Hadi Dharmawan** (Bogor Agricultural University),  
**Akhmad Fauzi** (Bogor Agricultural University), and **M. Parulin Hutagaol** (Bogor Agricultural University)

### **GOVERNANCE INSTITUTIONAL OF MINERAL FUND IN SUPPORTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT: STUDY CASE BOMBANA REGENCY, SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE**

*JEKP*, Vol. 7, No. 1, June 2016, pp. 29-42

#### **Abstract**

*Management of mining in a region should create prosperity to the people, especially local communities living in the mining area. But mining regions are trapped in the so called resource curse and dutch disease. Regional income generated from mineral fund, which is an instrument of cash transfer, tends to fail to create prosperity. The blame lies with the biases of target, program, and coordination which fail to prosper the people. The aims of this research are (1) to determine key indicators of institutional governance of mineral fund (2) to determine the best alternative in managing and using the mineral fund. The results show that (i) the key indicators that have the level of interest and dominant influence in institutional governance of mineral fund is the availability of regulation, on-target program, control of the mining company's production costs, control of the mining company's production, a managing body of mineral fund, namely a multi-parties institution, (ii) the best alternatives of the use of mineral fund supporting the sustainable development are (a) social aspects which include improvement of health, education, and places of worship facilities, more roles of local indigenous people in decision making, better human resources, community empowerment, and greater roles of local community in the management of environment, (b) economic aspects, which include improvement of economic and financial institutions, rural economic diversification, primary investment development, better climate for investment and promotion of local products, and (c) environmental aspects, which include prevention and solution of pollution, protection and safety of ecology and humans, disaster management, and end-land management as primary sector.*

*Key words: governance, institutional, mineral fund, sustainable development*



Davy Hendri (IAIN Imam Bonjol)

**INDONESIAN BANKING FINANCIAL INTERMEDIATION COSTS:  
ROLES OF REGULATION AND INSTITUTION**

JEKP, Vol. 7, No. 1, June 2016, pp. 43-65

**Abstract**

*This study discusses the determinants of net interest margin (NIM) in Indonesia using a panel dataset bank in the period from 2004-2012 which includes a sample of 42 commercial banks of all operating commercial banks. This study uses applied theory of dealership model for the analysis. This is done by incorporating several variables such as macroeconomic, institutional conditions, and regulations of banking industry. With data support that includes different type categories of banking based on the largest share ownership (State Owned Banks, foreign, and mixed bank ownership) and scope of services (foreign exchange services), fixed effect panel regression analysis is performed by comparing specific characteristics of each of the bank. The study results show that indeed the specific characteristics of bank, such as size, liquidity, and market forces, as well as the structure of the markets in which a bank operates, explain most of NIM variation. However, regulation and institutional quality do not sufficiently help explain costs variations in the financial intermediation. These findings are quite different from those of mainstream findings of banking study in developed countries. It can at least be explained by the possible level of Indonesian banking regulations that actually have reached the maximum standards and the possibility of regulatory indicators that can not be seen isolated from the structure of ownership rights and competition in banking industry that has earlier taken place. There is great potential to promote banking competition policies and strengthen institutional frameworks in order to further reduce the cost of intermediation of the banking system.*

*Keywords: net interest margins, market structure, macroeconomy, good governance*

Mandala Harefa (Research Centre, Indonesian House of Representative Expertise Agency)

**OBSTACLES IN THE IMPLEMENTATION AND EFFECTIVENESS OF THE COLLECTION OF PROPERTY TAX  
OF RURAL AND URBAN SECTORS (PBB-P2) BY REGIONAL GOVERNMENT OF MAKASSAR**

JEKP, Vol. 7, No. 1, June 2016, pp. 67-82

**Abstract**

*Based on the implementation the law Number 28 Year 2009 on Local Tax and Retribution Fee, the authority to collect property tax at regional level (PBB-P2) should be transferred to local government due to implementation of decentralization policy. Such condition will encourage local governments to be more seriously seek potentials from regional income from PBB-P2 sector, such as in the city of Makassar. The aims of this research are (1) to know implementation of PBB-P2 tranfered to local government at Makassar city and (2) to analyze the determinant of efficiency resistor in PBB-P2 tranfered to local government at Makassar city. Qualitative description is used and completed with primary data (collected in depth interview) and secondary data. This research shows that Makassar Dispenda is the agency tasked with the collection of PBB-P2 at regional level. In performing its tasks, it forms a special agency called Technical Management Unit. It has the authority to collect taxes at city level. Efforts to disseminate information to achieve the increase in tax collection are revising data base obtained from Tax Office, revitalizing tax collection, improving supervision of income generated from tax, improving administrative efficiency, and facilitating coordination with related institutions to pay property tax. The criteria of regional tax collection by the Dispenda through UPT in Makassar is deemed "very effective". The increase of tax revenue is due to the policy of the regional government to raise property tax. Meanwhile, the criteria of tax revenue from 2012-2014 for the regional income of Makassar is still considered low.*

*Keywords: decentralization, tax, regional revenue, regional government at city level*

**Dewi Restu Mangeswuri** (Research Centre, Indonesian House of Representative Expertise Agency)

**POLICY ON HOUSING LOAN THROUGH HOUSING LOAN LIQUIDITY FACILITY (FLPP)**

*JEKP*, Vol. 7, No. 1, June 2016, pp. 83-95

**Abstract**

*Article 19 the Law No 1 2011 on Housing and Settlement Areas states that housing and settlement are the tasks that should be fulfilled by the government and local government because every citizen has the right to a neat and decent housing. Besides the physical aspects of housing, loan is also an important aspect for the government to pay attention to as not all citizens are able to buy house in cash. Based on the census data of 2010 conducted by the Central Statistics Agency, it is revealed that there is 13.5 million units backlog. The government through Housing Loan Liquidity Facility (FLPP) program hopes this policy can help provide its citizens with affordable housing. The study uses a qualitative descriptive methodology, with the secondary data obtained from journals, literature, and online media and other formal sources. The purpose of this writing are to analyze FLPP program which has been running up to now as well as to obtain information whether is there other alternative policies that could improve the quality of FLPP related to housing loan. The results of the analysis show that FLPP program generated from the State Budget post financing has been realized in accordance with the plan along with its budget. Besides FLPP program, there are two other alternatives offered by the government, namely the Subsidy of Interest Rate (SSB) and Subsidy of Down Payment (BUM) programs. These alternatives is hoped to provide solution for the low-income citizens to access to home loan.*

*Keywords: financing, loan, housing, Housing Loan Liquidity Facility (FLPP), low income citizens (MBR)*

**Arman** (Trilogi University), **Setia Hadi** (Bogor Agricultural University),  
**Noer Azam Achsani** (Bogor Agricultural University), and **Akhmad Fauzi** (Bogor Agricultural University)

**THE IMPACT OF ECONOMIC LINKAGE OF SULAWESI ISLAND, EAST JAVA, AND EAST KALIMANTAN ON REGIONAL ECONOMIC**

*JEKP*, Vol. 7, No. 1, June 2016, pp. 97-109

**Abstract**

*Economic disparities between regions in Indonesia are still ongoing, whereby Java control of  $\pm 60$  percent of economic activity. This study analyze the effects of the economic linkages among the regions of Sulawesi Island, East Java, and East Kalimantan. North Sulawesi, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, and Gorontalo were aggregated become the Other Sulawesi. South Sulawesi and West Sulawesi were aggregated become South Sulawesi. Data of 2005 is upgraded to be the data of 2011 by using the RAS technique. The analysis showed that the transaction flow of goods between the regions of Other Sulawesi and South Sulawesi is still very small. Both regions are dependent on the supply of the goods from the East Java. Economic linkages between East Kalimantan and Sulawesi Island were influenced by the flow of agricultural commodities and energy. The East Java economic obtain benefit mostly from the economic interaction with Sulawesi Island and East Kalimantan. The result of interaction between regions provide a very large spillover effect on the region of East Java. The spillover Indicating to increase the economic performance of East Java region when economic linkages with the region of Sulawesi Island and East Kalimantan are getting stronger. The impact of economic linkages in all four regions showed East Java obtain greater benefit. However, the performance of economic growth in East Java provide spillover effect which is still very small for Sulawesi and Kalimantan.*

*Keywords: economic linkage, regional economic, IRIO model*

**Ebed Hamri** (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Konawe, Southeast Sulawesi),  
**Eka Intan Kumala Putri** (Bogor Agricultural University), **Hermanto J. Siregar** (Bogor Agricultural University), and  
**Deddy S. Bratakusumah** (Pusbindiklatren, Jakarta)

**REGIONAL AUTONOMY POLICY AND THE DEVELOPMENT OF CENTRAL  
OF ECONOMIC GROWTH OF TASIKMALAYA CITY**

*JEKP*, Vol. 7, No. 1, June 2016, pp. 111-125

**Abstract**

*The research was conducted at Tasikmalaya City as a city resulted from regional autonomy in 2001 and had developed into a center of economic development in Priangan Timur area of West Java Province. The research was aimed to analyze the development of regional economic structure and superior sector which was the economic competitiveness of Tasikmlaya City compare to other surrounding areas. The research was used analysis of Klassen typology, Entropy Diversity Index (EDI) analysis, and Location Quotient (LQ) analysis. The research indicated a result analysis of Klassen typology that Tasikmalaya City was within the classification of fast growth area; whereas, hinterland regencies were within the classification of relatively remote area. The result of EDI analysis shows that the average entropy index of Tasikmalaya City (0.85) was bigger than the average entropy value of its hinterlands, which were Tasikmalaya Regency (0.71), Garut Regency (0.67), Ciamis Regency (0.81), Banjar City (0.83), and Pangandaran Regency (0,74). The higher value of entropy shows that regional economic of Tasikmalaya City was more advanced and developed. LQ analysis indicated that the average LQ of Tasikmalaya City was higher than hinterland area. The result shows average LQ value of Tasikmalaya City (12.80) was bigger than the average LQ value of its hinterland; which were Tasikmalaya Regency (9.73), Garut Regency (9.25), Ciamis Regency (11.23), Banjar City (10.91), and Pangandaran Regency (10.20). The superior sectors that became the economic basis sector of Tasikmalaya City were building, trade, hotel and restaurant, transportation and communication, finance, rent and financial services, and services.*

*Keywords: regional autonomy, Klassen typology, entropy diversity, location quotient, growth center*